

Strategi Komunikasi Pengelolaan Informasi di Diskominfosan Malut (Studi PPID)

Rachmat Hidayat Buamona, Sunarto Sunarto, Yunita Sari

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
E-mail penulis pertama/korespondensi : buamonaikhing@gmail.com

Abstract

The implementation of Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure in North Maluku faces three main challenges: limited competent human resources, low public awareness, and an openness index below national standards. This study analyzes the communication strategy of information management at the Maluku Communication and Information Service through the PPID using a qualitative case study approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews with 12 informants, and document analysis, then analyzed using the Miles-Huberman model (data reduction, presentation, verification). The research findings show that the communication strategy runs in three phases: (1) Planning (identification of needs and policy formulation), (2) Implementation (information distribution via website/manual method and HR training), and (3) Evaluation (routine meetings and annual monitoring and evaluation). The main obstacles include: weak coordination between OPDs, uneven socialization, and limited HR and budget. The study recommends: (1) increasing HR capacity through special training, (2) adequate budget allocation, and (3) developing a creative digital-based socialization model and community approach. The implementation of these recommendations is expected to increase transparency and accountability in the management of public information in North Maluku.

Keywords: Public Information Disclosure; Communication Strategy; PPID

Abstrak

Implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Maluku Utara menghadapi tiga tantangan utama: keterbatasan SDM kompeten, rendahnya kesadaran masyarakat, dan indeks keterbukaan di bawah standar nasional. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi pengelolaan informasi di Diskominfosan Malut melalui PPID dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 12 informan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model Miles-Huberman (reduksi, penyajian, verifikasi data). Temuan penelitian menunjukkan strategi komunikasi berjalan dalam tiga fase: (1) Perencanaan (identifikasi kebutuhan dan penyusunan kebijakan), (2) Implementasi (distribusi informasi via website/metode manual serta pelatihan SDM), dan (3) Evaluasi (rapat rutin dan Monev tahunan). Kendala utama meliputi: koordinasi antar-OPD yang lemah, sosialisasi tidak merata, serta keterbatasan SDM dan anggaran. Penelitian merekomendasikan: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus, (2) alokasi anggaran memadai, dan (3) pengembangan model sosialisasi kreatif berbasis digital dan pendekatan komunitas. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik di Maluku Utara.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Public; Strategi Komunikasi; PPID

PENDAHULUAN

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik memiliki peran krusial dalam mendorong partisipasi aktif warga negara, memastikan transparansi pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 dan diimplementasikan melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ketersediaan informasi menjadi kebutuhan esensial bagi setiap individu dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan, guna meraih kemajuan personal dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab utama negara untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi diberikan secara merata dan luas kepada seluruh warga negara (Lutfi & Satriawan, 2014).

Hadirnya UU KIP di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Undang-undang ini mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan pelaksanaan hak warga negara atas informasi yang dimiliki oleh lembaga publik. Konsep ini sejalan dengan good governance, di mana transparansi menjadi aspek sentral. Berdasarkan UU KIP, Pasal 4 memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi publik sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hak untuk melihat, mengetahui, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan Salinan informasi publik, serta menyebarluaskan informasi tersebut. Namun, pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi sering terkendala oleh sejumlah hambatan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengakses informasi, ketidakpastian serta kekhawatiran dari pihak penyelenggara negara atau badan publik untuk membeberkan data, serta kekurangan panduan yang jelas bagi para penyelenggara negara dalam menyusun strategi yang efektif untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan jujur kepada publik (Hapiz, 2021).

Dalam konteks ini, Diskominfosan Provinsi Maluku Utara telah diamanahkan sebagai PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi/data serta dokumentasi. Diskominfosan melalui PPID sepatutnya memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kenyataan serta mampu mengkomunikaskannya kepada masyarakat dengan cepat dan tepat.

Pada tanggal 25 September 2023, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjuk PPID dan PPID Pelaksana melalui Keputusan Gubernur Nomor 442/KPTS/MU/2023, dengan Diskominfosan berperan sebagai PPID utama, sementara semua Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PPID Pelaksana. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi saat ini tidak selaras dengan tujuan yang diharapkan dari pembentukan PPID. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber

daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Kurangnya komunikasi yang efektif serta kurangnya sosialisasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka terhadap informasi publik. Hal ini terlihat dari jumlah permohonan informasi yang masih sangat rendah. Pada tahun 2023, Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk Provinsi Maluku Utara mencapai angka 67,13, menempatkan provinsi ini pada peringkat tiga terbawah secara nasional. Penilaian ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta implementasi UU KIP.

Hasil penilaian ini diharapkan menjadi titik awal untuk merumuskan upaya perbaikan dan strategi komunikasi Diskominfosan yang lebih efektif dalam pengelolaan informasi publik.

Menurut Effendy Uchjana, strategi komunikasi adalah kombinasi antara perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah konsep manajemen strategis menurut Fred R. David yang memiliki tiga tahapan, yaitu: perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dengan strategi komunikasi yang matang serta manajemen yang baik, Diskominfosan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Masyarakat akan lebih partisipatif dalam memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dengan batas waktu penelitian selama 2 bulan terhitung Bulan November hingga Februari. Yang dimana Subjek dari penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Dinas Diskominfosan Malut
- 2) Kepala Bidang PIKS .
- 3) Kasubag Kepegawain.
- 4) Fungsional Pranata Humas
- 5) Bidang Perencanaan
- 6) Anggota PPID sebanyak 2 orang.
- 7) Masyarakat sebanyak 2 orang Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data secara primer yang melalui wawancara dengan informan . Adapun untuk menguji keabsahan data wawancara dan observasi menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Menggunakan wawancara dan dokumentasi Pada penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan seperti model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Strategi komunikasi memiliki peran sentral dalam setiap organisasi, termasuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam hal ini PPID. Melalui proses ini, organisasi dapat menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang, merumuskan strategi komunikasi dan taktik untuk mencapai target tersebut, serta mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Strategi komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Diskominfosan yang dilakukan melalui perencanaan, kemudian implementasi dan terakhir evaluasi.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Biasanya, perencanaan mengacu pada perwujudan tujuan sebuah organisasi dan menyiapkan strategi yang digunakan agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cepat.

perencanaan strategi komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada diskominfosan melibatkan sejumlah langkah strategis yang saling berkaitan. Kami mulai dengan melakukan penganggaran, koordinasi intensif dengan PPID dan PPID pelaksana untuk menentukan kebutuhan spesifik pengelolaan informasi dan dokumentasi. Proses ini melibatkan identifikasi prioritas berdasarkan jenis informasi yang harus dikelola serta urgensi dan kebutuhan publik. Selanjutnya, kami mengatur pembagian tugas pada staf PPID guna mempermudah pelaksanaan tugas mereka. Kami juga menyusun dan mengembangkan kebijakan serta prosedur standar operasional untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi, sambil mengembangkan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Selain itu, kami memberikan perhatian khusus pada pelatihan sumber daya manusia dan berkoordinasi dengan pelaksana (OPD) untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar.

b. Implementasi

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan setelah merumuskan perencanaan yang telah dibuat. Informasi yang diberikan oleh Diskominfosan Provinsi Maluku Utara kepada masyarakat beragam bentuknya. Pelaksanaan strategi yang dilakukan Diskominfosan Provinsi Maluku Utara adalah melalui, website, koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan sumber daya manusia.

1) Website

Website memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, terutama bagi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara, selain website tempat pelayanan yang bersifat manual atau ruangan PPID. Melalui website, dinas ini dapat menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dan stakeholder untuk mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan, program, dan layanan yang disediakan. Dengan adanya website yang baik, efisiensi dalam penyebaran informasi dapat ditingkatkan secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada metode komunikasi konvensional seperti surat atau brosur, dan memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih dinamis dan responsif, namun demikian

pelayanan secara manual masih bisa dilakukan di ruangan PPID baik itu dalam memberikan data/dokumen atau sekedar memberikan informasi.



Gambar 1.
Website PPID Provinsi Maluku Utara

Website memiliki peranan krusial dalam menjalankan strategi Komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Website dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan informasi serta dokumentasi, serta memfasilitasi pengguna dalam pencarian informasi yang mereka perlukan. Selain itu, website juga menjadi sarana penting dalam menjalankan strategi tersebut, terutama dalam aspek komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Walaupun dalam pelayanan informasi masih di lakukan juga pelayanan secara manual atau bertemu langsung di ruangan PPID untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, namun dengan website memungkinkan penyampaian informasi yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan instansi tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks Maluku Utara sebagai daerah kepulauan, keberadaan website menjadi krusial karena memungkinkan akses informasi secara online yang lebih efisien. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperbaiki website agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta mendukung strategi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik.

2) Koordinasi dan Sosialisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat

Strategi lain yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah mengkoordinasikan aktivitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini sangat vital dalam mendukung tujuan PPID terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, terutama dalam menjamin kelancaran penyebaran informasi kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Koordinasi antar OPD dan sosialisasi kepada masyarakat adalah langkah strategis utama yang diambil oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Meskipun tantangan dalam komunikasi antar OPD masih ada, upaya untuk memperkuat sistem koordinasi dan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang cara mengakses informasi yang dibutuhkan terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, serta menjadi indikator keberhasilan.

3) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

SDM yang berkualitas dan berpengalaman memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan strategi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang matang dan efektif. Keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa strategi dapat dilaksanakan dengan baik.

Terlampir data terkait jumlah pegawai di Bidang Pengelolaan Informasi dan Kapasitas Sumber Daya. Sayangnya, jumlahnya masih terbatas. Saat ini, hanya dua orang yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda, serta enam staf lainnya. Kondisi ini tergambar dengan jelas pada gambar yang saya lampirkan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas seperti ini, tentunya tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan informasi akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan serta kemampuan yang relevan dengan bidang tugas masing-masing. Seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.
Bezeting ASN Diskominfosan

c. Evaluasi

Setelah merumuskan dan melaksanakan, tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Diskominfosan Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan strategi komunikasi pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui rapat setiap bulannya dan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan dan informasi tersebut sampai di masyarakat. Evaluasi juga dilakukan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai maupun hasil atau dampak pelaksanaannya.

Dalam melakukan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyebaran informasi kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan sebulan sekali dan setiap tahun ada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Beberapa poin juga menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi yang dilakukan, di antaranya evaluasi dari pihak internal pegawai Diskominfosan dan pihak

eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan saling mengoreksi tim satu sama lain saat rapat, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pekerjaan yang kurang tepat. Evaluasi eksternal melibatkan masukan dari PPID pelaksana atau OPD dan masyarakat.

2. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan strategi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Provinsi Maluku Utara, faktor pendukung PPID Provinsi Maluku Utara. Peneliti telah mengidentifikasi sejumlah temuan terkait faktor pendukung dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Provinsi Maluku Utara.

a. Kesadaran terhadap kesalahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan strategi

Kesadaran terhadap kesalahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan strategi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara menjadi faktor pendukung internal yang penting. Para informan menyadari bahwa pemahaman akan kekurangan dan kesalahan ini adalah langkah positif untuk mencapai kemajuan.

b. Pergub terkait PPID

SK PPID berperan krusial sebagai panduan yang jelas bagi anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik. Pedoman ini memastikan efisiensi dan memfasilitasi perancangan serta pelaksanaan strategi dengan menyediakan kerangka kerja yang mencakup tugas, tanggung jawab, dan prosedur yang harus diikuti. Ini memungkinkan Dinas mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur. SK PPID juga digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, menilai pencapaian tujuan, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung transparansi dalam pelayanan publik.

3. Faktor Penghambat

Mengetahui faktor penghambat dalam menjalankan strategi komunikasi Diskominfosan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sangat krusial karena dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut. Identifikasi faktor-faktor penghambat memungkinkan dilakukannya upaya untuk meminimalkan atau mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga implementasi strategi dapat berlangsung secara lancar dan efektif.

a. keterbatasan anggaran

keterbatasan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, memunculkan kendala serius dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi terutama dalam pengadaan peralatan, software, infrastruktur jaringan, dan kebutuhan sumber daya manusia yang

esensial untuk pengelolaan informasi yang efektif dan efisien. Tanpa anggaran yang memadai, implementasi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi modern menjadi terhambat, dan instansi kesulitan memenuhi standar teknologi informasi yang diperlukan.

b. Komunikasi internal yang tidak berjalan baik

Komunikasi internal dalam instansi terkait masih belum optimal, terutama dalam konteks bagian perencanaan dan staf ppid dalam menjalankan strategi komunikasi diskominfosan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Masalah pemahaman, pengambilan keputusan, koordinasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan terhambatnya usulan kegiatan dalam rencana strategis. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Kurangnya SDM dalam pengelolaan Informasi dan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan suatu hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan strategi. Keberadaan SDM yang berpengalaman dan terlatih sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tanpa kehadiran SDM yang terlatih, mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah, menjalankan tujuan yang jelas, serta menyusun strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai sasaran pengelolaan informasi dan dokumentasi.

c. Kurangnya kerjasama Komunikasi antar OPD

Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan oleh PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Terdapat kekurangan dalam melibatkan OPD pelaksana, sehingga proses pengelolaan informasi dan dokumentasi terkadang tidak berjalan sesuai harapan. Pentingnya adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar OPD diakui sebagai kunci keberhasilan menjalankan strategi, dan hal ini menjadi fokus untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih efektif.

d. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi PPID

Kurangnya kesadaran masyarakat karena kurangnya upaya sosialisasi dari pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dala hal ini PPID sendiri juga menjadi penghambat. Sosialisasi yang terbatas, baik melalui media sosial, website, maupun kegiatan sosialisasi secara langsung, membuat informasi tentang PPID tidak tersebar luas. Hal ini mengakibatkan rendahnya permohonan informasi yang masuk ke PPID, serta minimnya interaksi antara masyarakat dan instansi pemerintah dalam hal pertukaran informasi. Sosialisasi yang lebih agresif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tahu dan memahami bagaimana cara mengakses informasi publik, serta manfaat yang bisa mereka peroleh dari layanan ini.

PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi adalah sebuah pencampuran antara communication

planning (perencanaan komunikasi) dengan Communication management (manajemen Komunikasi) menuju target yang telah di tetapkan. Strategi komunikasi harus bisa menunjukkan bagaimana cara kerjanya dengan praktis, yaitu melalui pendekatan yang dipakai tentunya akan bergantung pada situasi dan kondisi (dalam Effendy 2003). Sedangkan menurut Fred R David Startegi Komunikasi meliputi 3 tahapan. Merencanakan strategi, melaksanakan startegi, dan evaluasi strategi.

Perencanaan strategi melibatkan penyusunan langkah-langkah ke depan dengan tujuan untuk menetapkan tujuan strategis dan merancang strategi guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyediakan pengalaman yang optimal bagi penerima informasi (dalam Sedjati:2019). Keputusan dalam merumuskan strategi melibatkan lembaga dalam hal produk, pasar, sumber daya, dan teknologi yang spesifik dalam jangka waktu yang panjang. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Keputusan strategis, baik atau buruk, memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada lembaga tersebut dalam berbagai fungsi.

Analisis Perencanaan Startegi

Dalam perencanaan oleh Diskominfo Provinsi Maluku Utara, pendekatan yang komprehensif diterapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi publik. Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas, yang melibatkan penilaian mendalam terhadap jenis informasi dan dokumentasi yang perlu dikelola. Langkah ini mencakup analisis terhadap berbagai jenis informasi yang penting bagi masyarakat, serta penentuan prioritas berdasarkan urgensi dan relevansi informasi tersebut. Dengan memahami kebutuhan publik dan memetakan informasi yang diperlukan, Diskominfo dapat merancang strategi yang sesuai untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Diskominfo Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas informasi, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan dan prosedur standar operasional untuk pengelolaan informasi. Pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung efisiensi dan keamanan pengelolaan informasi juga menjadi fokus utama. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi intensif dengan PPID dan OPD, memastikan bahwa proses pengelolaan informasi berjalan dengan baik dan efektif. Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kualitas pengelolaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara, sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

a. Implementasi Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi sering disebut "tahap tindakan" dari manajemen strategis. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan menjadi tindakan (dalam david:2002), untuk tercapainya kesuksesan strategi, maka dibutuhkan

kedisiplinan, motivasi, dan kerja keras. Mewujudkan hal ini perlu bertumpu pada alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan melalui penetapan struktur organisasi yang efisien dan adaptif, serta menciptakan budaya kerja yang terbuka, inklusif, dan inovatif.

Diskominfosan Provinsi Maluku Utara telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui penggunaan website, koordinasi antar OPD, dan sosialisasi kepada masyarakat, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Pengembangan website yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen merupakan kunci untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan informasi dapat terlaksana dengan baik. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

b. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan penilaian terhadap hasil yang dicapai setelah penerapan strategi (dalam David:2002). Evaluasi strategi memainkan peran kunci dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami sejauh mana strategi yang dijalankan telah mencapai tujuan organisasi dan sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Diskominfosan Provinsi Maluku Utara menjalankan evaluasi secara rutin untuk memastikan strategi pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap bulan, tim melakukan rapat evaluasi untuk menilai pelaksanaan strategi yang telah diterapkan. Selain evaluasi bulanan, Diskominfosan juga mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahunan. Kegiatan ini melibatkan seluruh PPID pelaksana dan OPD untuk menilai keberhasilan yang dicapai selama setahun serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi tahunan ini memberikan gambaran komprehensif tentang dampak keseluruhan dari strategi komunikasi dan pengelolaan informasi, serta membantu dalam perencanaan dan penyesuaian untuk tahun berikutnya.

Evaluasi internal dilakukan dalam rapat tim, di mana anggota tim saling mengoreksi dan mendiskusikan pekerjaan yang kurang tepat. Proses ini memungkinkan tim untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan memastikan bahwa setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dengan melaksanakan evaluasi internal dan eksternal secara teratur, Diskominfosan dapat memastikan bahwa strategi komunikasi diskominfosan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan dengan baik. Evaluasi ini membantu dalam memastikan bahwa informasi disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat, serta memungkinkan tim untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi.

2. Analisis Faktor Pendukung

Berdasarkan analisis mengenai faktor pendukung dalam menjalankan

Strategi Komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara melalui PPID, ditemukan beberapa faktor penting. Pertama, kesadaran akan kesalahan dalam proses pengelolaan informasi menjadi faktor pendukung internal yang signifikan. Para informan menyadari adanya berbagai kekurangan dalam strategi yang dijalankan.

Kedua, Surat Keputusan Gubernur terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SK PPID) dianggap sebagai faktor pendukung eksternal yang penting. SK PPID memberikan arahan yang jelas dan sistematis dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Dengan demikian, upaya perbaikan yang diidentifikasi oleh para informan menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dengan melibatkan seluruh unit kerja, memperjelas tujuan, meningkatkan evaluasi, melibatkan pihak eksternal, dan mempertimbangkan teknologi yang sesuai, diharapkan instansi dapat membangun landasan yang lebih kuat dan mencapai tujuan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan lebih baik.

3. Analisis Faktor Penghambat

Analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi Strategi Komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara melalui PPID mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kendala dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan anggaran, yang mempengaruhi pengadaan peralatan, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan, serta kebutuhan sumber daya manusia yang esensial.

Selain itu, komunikasi internal yang tidak berjalan dengan baik juga merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan strategi. Koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan baik antara pimpinan, bagian perencanaan dan bidang yang membidangi PPID menyebabkan strategi sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Kurangnya komunikasi ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga usulan kegiatan dalam rencana strategis sering tidak terealisasi. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi internal diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan strategis diambil secara kolektif dan kegiatan dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi juga memperburuk situasi. Staf yang berpengalaman dan terlatih sangat penting untuk menjalankan strategi secara optimal.

Kurangnya kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku PPID pelaksana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Terbatasnya koordinasi dan kerjasama antar OPD menghambat integrasi informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung strategi.

Faktor eksternal yang signifikan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sosialisasi yang terbatas mengenai PPID

menyebabkan rendahnya tingkat permohonan informasi dan partisipasi publik. Masyarakat tidak sepenuhnya memahami peran dan cara mengakses layanan yang disediakan oleh PPID sehingga menghambat transparansi informasi publik. Upaya sosialisasi yang lebih intensif dan strategis diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai PPID, agar tujuan keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Strategi komunikasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Diskominfosan Provinsi Maluku Utara melalui PPID telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun, tantangan utama masih terletak pada aspek koordinasi yang belum optimal, baik secara internal antara pimpinan dan staf maupun eksternal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kurangnya sinergi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan strategi komunikasi secara keseluruhan. Di sisi lain, sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat belum berjalan maksimal, sehingga pemahaman dan partisipasi publik dalam mengakses informasi cenderung rendah. Rendahnya tingkat permohonan informasi dan minimnya interaksi antara masyarakat dengan instansi pemerintah turut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai model koordinasi yang efektif antar OPD dalam konteks pengelolaan informasi publik, termasuk analisis hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi sinergi tersebut. Selain itu, perlu dikembangkan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan partisipatif, seperti pemanfaatan platform digital atau kolaborasi dengan komunitas lokal, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka dalam mengakses informasi. Penelitian juga dapat mempertimbangkan evaluasi kebutuhan SDM dan anggaran yang lebih komprehensif untuk mendukung optimalisasi fungsi PPID di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- David, F. R. (2002). *Manajemen strategi: Konsep* (Edisi ketujuh). PT Prenhallindo.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu komunikasi teori dan praktik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lutfi, M., & Satriawan, I. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal:

- Nababan, S. (2019). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166-180. <https://media.neliti.com/media/publications/464862-none-58a8576d.pdf>
- Sjoraida, F. D. (2015). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintah provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18(3), 212-

219. <https://core.ac.uk/download/295384808.pdf>

Laporan:

Hapiz, M. (2021). *Transformasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Indonesia* (I. G. Sufa, A. N. Sholikhah, & W. Feriana, Eds.). Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Tesis/Skripsi:

Akhmad, F. (2020). *Strategi penyebaran informasi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang* [Tesis magister, Universitas Hasanuddin].

Ariandayani, S. (2021). *Analisis jaringan komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu dalam menyediakan informasi publik pada pemerintah kota Solok* [Skripsi sarjana, Universitas Andalas].

Jannah, R. N. (2015). *Strategi media relation humas DPR RI melalui parlemen dalam mengendalikan pemberitaan tentang DPR-RI (Studi kasus pemilihan ketua DPR RI periode 2014-2019)* [Skripsi sarjana, Universitas Mercu Buana].

Rahutomo, N. A. (2013). *Strategi humas dalam mempublikasikan informasi pelayanan publik pada PT PLN (Persero) rayon di Samarinda Ilir* [Skripsi sarjana, Universitas Mulawarman]. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/eJURNAL%20adi%20nugroho%20\(06-08-13-02-52-48\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/eJURNAL%20adi%20nugroho%20(06-08-13-02-52-48).pdf)